

PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU BAGI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S, MICHAEL MANAROV GULTOM

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat¹, Pemuda Katolik²
gokmatoniparlindungan@gmail.com¹, michaelmunarofgultom@gmail.com²

Abstract: *Quality, transparent and fair elections are the main foundation for the continuation of a healthy democracy. To achieve this, education on election supervision for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of fairness and integrity. This article reviews the importance of election supervision education and its implications in realizing the principles of fairness and integrity of elections. First, election supervision education provides an in-depth understanding of the public regarding the electoral process, including the rules that apply and their roles and responsibilities in the process. With a good understanding, the public can actively participate in monitoring and ensure that elections run according to democratic principles. Second, election supervision education equips the public with the necessary supervisory skills, such as monitoring campaign activities, voting and vote counting. These skills include understanding control protocols, using information technology, and reporting monitoring results. With these skills, the community can carry out supervision effectively and accurately. Furthermore, election supervision education also emphasizes the importance of supervisory ethics, including neutrality, honesty and professionalism in carrying out supervisory duties. The community is given an understanding of the importance of maintaining integrity and fairness in carrying out supervisory duties, so as to create an environment of supervision with integrity and trustworthiness. Finally, election supervision education encourages collaboration and monitoring networks between communities, civil society organizations, and related institutions. Through this collaboration, information exchange, coordination of monitoring activities, and mutual support in reporting and following up on election violations can be carried out more effectively. This article underscores the importance of education for election supervision for society in realizing the principles of fairness and integrity. With proper education, it is hoped that the community can play an active and responsible role in maintaining the integrity of elections, overseeing their implementation, and reporting and following up on violations that occur. Thus, elections that are democratic, fair and with integrity can be realized.*

Keywords: *Supervision, Elections, Society.*

Abstrak: Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas *luber jurdil* dan berintegritas. Artikel ini mengulas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas *luber jurdil* serta integritas pemilu. Pertama, pendidikan pengawasan pemilu memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai proses pemilu, termasuk aturan-aturan yang berlaku dan peran serta tanggung jawab mereka dalam proses tersebut. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, pendidikan pengawasan pemilu membekali masyarakat dengan keterampilan pengawasan yang diperlukan, seperti pemantauan kegiatan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Keterampilan ini meliputi pemahaman

terhadap protokol pengawasan, penggunaan teknologi informasi, dan pelaporan hasil pengawasan. Dengan keterampilan ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara efektif dan akurat. Selanjutnya, pendidikan pengawasan pemilu juga menekankan pentingnya etika pengawasan, termasuk netralitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, sehingga tercipta lingkungan pengawasan yang berintegritas dan dapat dipercaya. Terakhir, pendidikan pengawasan pemilu mendorong kolaborasi dan jaringan pengawasan antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terkait. Melalui kolaborasi ini, pertukaran informasi, koordinasi kegiatan pengawasan, serta saling mendukung dalam melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu dapat dilakukan dengan lebih efektif. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat dalam mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas. Dengan pendidikan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas pemilu, mengawasi pelaksanaannya, serta melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas dapat terwujud.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilu, Masyarakat.

A. Pendahuluan

Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Pemilu adalah proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara demokratis. Pemilu yang berkualitas mengacu pada proses yang mengikuti standar internasional dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, akses yang adil terhadap informasi politik, serta perlindungan hak asasi manusia.

Transparansi dalam pemilu menjamin bahwa proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat. Informasi mengenai calon, program kerja, dan sumber dana kampanye harus tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang cerdas dan memilih pemimpin berdasarkan informasi yang akurat.

Keadilan dalam pemilu adalah prinsip yang mendasar, di mana semua pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa diskriminasi. Semua calon harus memiliki akses yang sama ke media dan sarana kampanye, serta masyarakat harus memiliki akses yang sama ke tempat pemungutan suara. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap intimidasi, kekerasan, atau pengaruh yang tidak sah yang dapat memengaruhi keputusan pemilih.

Pentingnya pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil tidak dapat diragukan lagi. Hal ini karena pemilu merupakan salah satu cara utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan kehendak politik mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, menjaga integritas pemilu dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan menjadi sangat penting. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan yang responsif serta akuntabel dapat terwujud.

Pada tahun 2019, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu di Indonesia menjadi sangat penting. Masyarakat berperan aktif dalam menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan pemilu yang demokratis. Melalui berbagai inisiatif dan aksi, masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga keadilan dan keabsahan pemilu. Salah satu peran penting masyarakat adalah sebagai pengawas langsung di tempat pemungutan suara. Masyarakat yang menjadi saksi mata di TPS berperan dalam memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari

kecurangan. Mereka mengawasi kelancaran proses pemilu, memeriksa kelengkapan surat suara, serta memastikan hak pilih masyarakat terjaga dengan baik.

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu. Mereka melaporkan adanya kampanye ilegal, politik uang, atau upaya manipulasi data pemilih kepada lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Dengan melibatkan diri secara aktif, masyarakat turut menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Tidak hanya sebagai pengawas, masyarakat juga terlibat dalam upaya pendidikan pemilih. Mereka mengedukasi warga sekitar mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, memahami hak-hak pemilih, dan memberikan informasi yang objektif mengenai calon-calon yang bertarung. Dengan demikian, masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman tentang pentingnya pemilu yang berkualitas.

Secara keseluruhan, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu tahun 2019 di Indonesia sangatlah penting. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dengan partisipasi yang aktif dan tanggap terhadap permasalahan pemilu, masyarakat ikut berperan dalam memastikan pemilu yang berkualitas, adil, dan demokratis. Tentunya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 di Indonesia seharusnya meningkat dan menjadi lebih signifikan, artikel ini akan membahas hal tersebut dengan menggagas pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas.

B. Metodologi Penelitian

Artikel ini akan menggunakan metodologi penelitian normatif untuk menganalisis dan mengkaji pengawasan pemilu bagi masyarakat guna mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas. Berdasarkan analisis normatif maka akan kelihatan keberhasilan pengawasan pemilu oleh masyarakat dalam mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas. Identifikasi kekurangan atau celah dalam pengaturan hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengawasan pemilu oleh masyarakat. Metodologi penelitian normatif ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur pengawasan pemilu oleh masyarakat, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas dalam proses pemilu.

C. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat merupakan langkah penting untuk mewujudkan asas luber jurdil dan berintegritas dalam proses demokrasi. Melalui pendidikan pengawasan pemilu, masyarakat diberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memantau, mengawasi, dan memastikan keberlangsungan pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas.

Pendidikan pengawasan pemilu penting bagi masyarakat karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga integritas dan keberhasilan proses demokrasi. Antara lain sebagai berikut: **Pertama**, meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Pendidikan pengawasan pemilu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemilu. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya mengawasi dan memantau jalannya pemilu untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

Kedua, mencegah Pelanggaran Pemilu: Dengan pendidikan pengawasan pemilu, masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu. Mereka dapat belajar mengenali tindakan kecurangan seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga yang peka dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu tersebut.

Ketiga, mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Pendidikan pengawasan pemilu dapat membantu masyarakat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Masyarakat akan memiliki pemahaman tentang pentingnya penyediaan informasi yang jelas dan terbuka terkait calon, program, dan kegiatan kampanye. Mereka juga akan terdorong untuk memantau dan melaporkan pelanggaran terkait pemilu kepada lembaga pengawas pemilu atau pihak berwenang.

Keempat, meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan pendidikan pengawasan pemilu, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa pemilu yang diadakan adalah proses yang adil, jujur, dan bebas dari manipulasi. Mereka akan merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar, dan pemimpin yang terpilih akan mewakili kehendak mereka. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Kelima, mempertahankan Kualitas Demokrasi: Pendidikan pengawasan pemilu merupakan langkah penting dalam mempertahankan kualitas demokrasi. Dengan masyarakat yang teredukasi tentang pengawasan pemilu, akan tercipta lingkungan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kepentingan publik. Proses pemilu yang terawasi dengan baik akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mewakili kepentingan masyarakat secara adil.

Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pendidikan pengawasan pemilu belajar dari pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang proses pemilu: Masyarakat perlu memahami secara detail tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilu, termasuk aturan-aturan yang berlaku, peran dan fungsi lembaga terkait, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam proses tersebut.
2. Pemahaman tentang asas *luber jurdil*: Masyarakat harus memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip kejujuran, ketelitian, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
3. Keterampilan pengawasan: Masyarakat perlu dilatih untuk memiliki keterampilan dalam mengawasi pemilu, seperti pemantauan kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan pengaduan dan pelanggaran pemilu. Hal ini meliputi pemahaman terhadap protokol pengawasan, penggunaan teknologi informasi, dan pelaporan hasil pengawasan.
4. Etika pengawasan: Pendidikan pengawasan pemilu juga perlu menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas pengawasan. Masyarakat harus memiliki kesadaran tentang pentingnya netralitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.
5. Kolaborasi dan jaringan pengawasan: Pendidikan pengawasan pemilu juga dapat mendorong kolaborasi antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terkait dalam membangun jaringan pengawasan yang kuat dan efektif. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi kegiatan pengawasan, serta saling mendukung dalam melaporkan dan menangani pelanggaran pemilu.

Berkaca dari Pemilu tahun 2019 maka pada tahun 2024 ini ada beberapa aspek yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu:

- a. Pendidikan Pemilih yang Intensif: Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, hak-hak pemilih, proses pemilu, dan peran serta masyarakat dalam menjaga integritasnya. Program pendidikan pemilih yang menyeluruh dan inklusif perlu disusun dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

- b. Penyediaan Informasi yang Lengkap: Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan lengkap terhadap informasi mengenai calon-calon yang bertarung, program kerja, rekam jejak, dan visi-misi mereka. Informasi ini harus disajikan secara objektif dan transparan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak saat memilih.
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Media Sosial: Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas informasi pemilu. Pemerintah dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi, mengadakan forum diskusi, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam dialog politik.
- d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan: Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Mereka dapat menjadi saksi di TPS, melaporkan potensi pelanggaran pemilu, serta memantau proses penghitungan suara. Keberadaan lembaga pengawas pemilu juga perlu diperkuat, sehingga masyarakat merasa percaya dan yakin bahwa pelanggaran pemilu akan ditindaklanjuti dengan tegas.
- e. Pemberdayaan Kelompok Marginal: Masyarakat harus memastikan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, disabilitas, dan komunitas adat. Mereka perlu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilu.
- f. Budaya Politik yang Sehat: Pembentukan budaya politik yang sehat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini mencakup toleransi, saling menghormati perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya perlu berperan dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan santun.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan akses yang mudah terhadap informasi dan pendidikan pemilih yang baik, partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 di Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis, adil, dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya hal yang sangat penting difikirkan, bahwa pemilu berintegritas di Indonesia melibatkan peran aktif dan partisipasi yang kuat dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu melalui beberapa langkah berikut:

- a. Pendaftaran Pemilih: Masyarakat perlu secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih agar mereka memiliki hak suara dan dapat berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat harus memastikan bahwa data pendaftaran mereka akurat dan terkini.
- b. Pendidikan Pemilih: Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan pemilih yang memadai untuk memahami proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan. Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, diskusi publik, seminar, dan pendekatan lainnya.
- c. Pengawasan Pemilu: Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemilu untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil dan jujur. Mereka dapat menjadi saksi dalam pemilihan, memantau kegiatan kampanye, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.
- d. Pemantauan Media Sosial: Masyarakat dapat membantu memantau dan menyebarkan informasi terkait pemilu melalui media sosial. Mereka dapat melaporkan akun atau konten yang menyebarkan berita palsu atau hoaks terkait pemilu, serta berkontribusi dalam memeriksa kebenaran informasi yang tersebar.

- e. Pelaporan Pelanggaran: Masyarakat harus berani melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, seperti politik uang, intimidasi, atau kecurangan lainnya. Mereka dapat melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga pengawas pemilu atau pihak berwenang yang berwenang menangani pelanggaran pemilu.
- f. Partisipasi dalam Debat Publik: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam debat publik yang diadakan oleh calon atau partai politik. Melalui partisipasi aktif dalam debat, masyarakat dapat mengenal lebih dekat calon pemimpin dan program kerja mereka, serta memberikan masukan atau pertanyaan yang relevan.

Dengan partisipasi yang kuat dari masyarakat, pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, adil, dan berintegritas. Melalui keterlibatan aktif dalam pemilu, masyarakat dapat ikut menjaga integritas demokrasi, memilih pemimpin yang berkualitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan kehendak rakyat.

D. Penutup

Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat memainkan peran yang penting dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Melalui pendidikan pemilih yang memadai, masyarakat dapat memahami pentingnya pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas bagi keberlangsungan demokrasi. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemilu yang aktif, memantau proses pemilu, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam pendaftaran pemilih, mendapatkan pendidikan pemilih yang memadai, dan melibatkan diri dalam pengawasan pemilu. Melalui peran mereka sebagai pengawas dan pelapor, masyarakat dapat membantu menjaga integritas pemilu dengan melaporkan pelanggaran, memantau kegiatan kampanye, dan memeriksa kebenaran informasi yang tersebar. Pemilu berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat yang proaktif. Dalam proses pemilu, penting bagi masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran, tidak terpengaruh oleh politik uang atau intimidasi, serta secara kritis memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan pemilu berintegritas dan menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.
- Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2000.
- Eep Syaifulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Georg Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, PustakaPelajar. Yogyakarta, 2023.
- Luky Sandra Amalia (editor), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta , 2022.
- Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Mutia Farida, *Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*. Universitas Pasundan, Bandung, 2020.

- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.